

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang lebih dikenal sebagai PBB memiliki tugas utama yakni memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Terbentuknya PBB pada tahun 1945 sebagai organisasi internasional memiliki tugas pokok diantaranya untuk mencegah terjadinya konflik, membantu pihak-pihak yang terlibat konflik dengan memberikan resolusi dan membantu mewujudkan perdamaian diantara pihak-pihak yang terlibat konflik. Dalam menjalankan tugas tersebut PBB membentuk Dewan Keamanan PBB atau DK PBB yang memiliki wewenang untuk dapat dibantu oleh Majelis Umum dan Sekretariat Jenderal PBB dalam menangani setiap konflik baik yang bersifat konflik antar negara dan konflik internal dalam negara yang seringkali disebut dengan perang saudara. Terdapat 3 kategori intervensi perdamaian PBB diantara menciptakan perdamaian (*peacemaking*), menjaga perdamaian (*peacekeeping*), dan penggalangan dana (*peacebuilding*). Dalam bentuk intervensi dan mekanisme peran yang diberikan PBB tersebut memberikan perilaku peran yang berbeda dalam memberikan intervensi dan resolusi dalam setiap menyelesaikan konflik (Fadillah *et al.*, 2018). Seperti yang terjadi pada perilaku peran yang diberikan PBB dalam mengatasi konflik perang saudara yang terjadi di Sudan pada periode 2003-2011 dengan periode 2020-2023 yang mengalami perbedaan perilaku peran.

Perang saudara yang terjadi di Sudan pada tahun 2003- 2011 secara garis besar terjadi karena perebutan wilayah Darfur antara Sudan Utara dan Sudan Selatan untuk kepentingan SDA dan politik Selama perang berlangsung yang terjadi dalam kurun waktu kurang lebih 8 tahun tersebut telah mendapat perhatian dari masyarakat internasional seperti PBB. Peran PBB sangat diperlukan mengingat sebagai organisasi internasional yang memiliki tugas utamanya menciptakan perdamaian dunia. Serta dalam studi kasus pada tahun 2003-2011 ini telah

menimbulkan korban jiwa 2 juta penduduk Sudan serta 4 juta diantaranya terpaksa harus mengungsi. Dalam memberikan perlindungan terhadap warga sipil di Sudan tersebut, PBB telah berhasil melakukan intervensi kemanusiaan dan memprioritaskan keamanan HAM bagi warga sipil di Sudan (Cahyati, 2017). Sementara perang saudara Sudan tahun 2020-2023 disebabkan karena perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh dua faksi utama rezim militer Sudan atas kekosongan pemerintahan Sudan pasca kudeta militer yang menjatuhkan pemerintahan Omar al-Bashir, pemimpin pemerintahan Sudan yang bersifat diktaktor. Dengan adanya perang saudara dalam periode tersebut menyebabkan setidaknya lebih dari 4.000 warga sipil menjadi korban akan kejahatan perang bersenjata tersebut (ICRC, 2023).

Perang saudara yang terjadi pada tahun 2003-2011 dengan tahun 2020-2023 memiliki gap yang cukup jauh yakni 9 tahun lamanya. Setelah Sudan mengalami *hiatus* dari masa perang saudara yang lekat dengan keberlanjutan perang di wilayah tersebut, perang saudara kembali terjadi pada tahun 2020-2023. Selama 9 tahun tersebut Sudan sedang mengalami perubahan dinamika politik pasca terbagi menjadi dua bagian yakni Sudan Utara dengan Sudan Selatan, kepentingan geopolitik pada periode ini cenderung mengarah pada negara Tiongkok, dan isu akan perbedaan etnis, suku dan budaya mendominasi situasi di Sudan pada periode ini (Cahyati, 2017). Hingga menuju tahun 2020 Sudan mengalami ketidakstabilan akan politik karena kekosongan pemerintahan pasca tuntutan kudeta militer yang telah menggulingkan kekuasaan Omar al-Bashir di tahun 2019. Sehingga menyebabkan perebutan kekuasaan oleh kedua faksi utama militer Sudan yang melatarbelakangi adanya perang saudara tahun 2020-2023 (Human Rights Watch, 2023). Perbedaan jangka waktu masa perang yang terjadi tentu akan memiliki dampak dan tingkatan eskalasi perang yang berbeda, dimana perang yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama menyebabkan kerusakan yang cukup parah baik dalam segi keadaan politik, ekonomi, otonomi, infrastruktur, keadaan atau lingkungan di Sudan. Hal terpenting dalam hal ini adalah tentu akan mengakibatkan jumlah korban yang cukup besar apabila dibandingkan dengan perang yang memiliki jangka waktu dalam hitungan tahun (Rohner, 2022).

Kesenjangan yang jauh antara jangka waktu perang saudara Sudan tahun 2003-2011 dengan tahun 2020-2023, menciptakan perbedaan perilaku peran PBB dalam menangani perang saudara dalam setiap periodenya.

Oleh karena itu penelitian mengenai **Perbedaan Perilaku Peran PBB Dalam Menangani Kasus Perang Saudara Sudan Tahun 2003-2011 Dengan Perang Saudara Sudan Tahun 2020-2023**, dianggap penting sebab untuk dapat mengetahui apa yang menjadi penyebab PBB mengambil tindakan yang berbeda dalam studi kasus kedua periode tersebut, yang apabila dilihat dalam dampaknya saling menyebabkan pelanggaran HAM, menewaskan banyak korban warga sipil, dan membuat situasi keamanan di Sudan berada dalam masa perang yang terjadi selama bertahun-tahun. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang membuat perbedaan perilaku PBB dalam mengambil tindakan menangani kasus perang saudara Sudan tahun 2003-2011 dengan perang saudara Sudan tahun 2020-2023, yang dimana dalam kedua periode tersebut turut menyebabkan pelanggaran HAM, menewaskan banyak warga sipil, dan membuat situasi konflik berkepanjangan di wilayah yang sama. Situasi konflik yang berkepanjangan tersebut tidak hanya mengancam keamanan manusia yakni para warga sipil di Sudan namun turut mengancam keamanan regional dan keamanan otoritas bagi negara-negara yang berbatasan langsung dengan negara Sudan.

1.2. Pertanyaan Penelitian/Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah menimbulkan sebuah pertanyaan penelitian atau rumusan masalah yakni **“Apa yang membuat perbedaan perilaku PBB dalam menangani kasus perang saudara Sudan tahun 2003-2011 dengan perang saudara Sudan tahun 2020-2023?”**

1.3. Batasan Masalah

Penelitian yang berjudul **Perbedaan Perilaku Peran PBB Dalam Menangani Kasus Perang Saudara Sudan Tahun 2003-2011 Dengan Perang Saudara Sudan Tahun 2020-2023** ini berfokus pada situasi konflik yang terjadi pada keberlanjutan perang saudara gelombang kedua pada tahun 2003-2011 dan situasi perang saudara yang selanjutnya kembali terjadi pada tahun 2020-2023 yang dimana dalam situasi konflik kedua periode tersebut dapat dikaitkan oleh tindakan rasisme seorang kepala pemerintahan Sudan Omar al-Bashir pada masa perang saudara kedua yang menginginkan sistem pemerintahannya berbasis Islam, sehingga pada tahun 2019 Bashir resmi digulingkan dalam kedudukannya sebagai kepala pemerintahan, hal tersebut berlanjut pada tahun 2020 yang menjadi awal mula konflik terjadi hingga saat ini tahun 2023 Sudan berada dalam kondisi konflik perang saudara karena perebutan kekuasaan di Sudan. Fokus penelitian kedua adalah menganalisa peran PBB dalam menangani konflik dalam kedua periode tersebut mengalami perbedaan tindakan. Yang dimana pada periode 2003-2011 PBB justru lebih fokus pada tindakan untuk mengamankan HAM sementara pada tahun 2020-2023 ini PBB justru cenderung berfokus pada upayanya membawa Sudan menuju pada transisi politik menuju pemerintahan yang bersifat demokrasi.

1.4. Tujuan Penelitian

Penelitian yang berjudul **Perbedaan Perilaku Peran PBB Dalam Menangani Kasus Perang Saudara Sudan Tahun 2003-2011 dengan Perang Saudara Sudan Tahun 2020-2023**, dilakukan dengan beberapa tujuan, diantaranya :

1. Untuk menganalisa masing-masing peran PBB dalam perang saudara di Sudan pada tahun 2003-2011 dengan tahun 2020-2023
2. Untuk menganalisa perbedaan perilaku yang diterapkan PBB dalam kasus perang saudara di tahun 2003-2011 dengan tahun 2020-2023

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1.5.1. Manfaat Akademis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan HI khususnya dalam penanganan sebuah perang yang dilakukan oleh organisasi internasional PBB
2. Mampu menambah literasi dan acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema dan studi kasus yang serupa dengan analisis teori terbaru

1.5.2. Manfaat Praktis :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan untuk menambah pengetahuan pembaca dalam menganalisis studi kasus perbedaan perilaku PBB dalam mengatasi perang saudara 2 yakni tahun 2003-2011 dan perang saudara 3 yakni tahun 2020-2023

1.6. Sistematika Penulisan Penelitian

Untuk mempermudah mengetahui pembahasan secara menyeluruh yang terdapat dalam skripsi ini, maka perlu dikemukakan sistematika penulisan yang terstruktur sebagai bagian dari kerangka dan pedoman penulisan skripsi. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang memuat latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, yang memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai bahan acuan yang berisi sumber data dalam mendukung penyusunan penelitian ini. Selain itu memuat landasan teoritis sebagai data pendukung untuk menjadikan penelitian ini sesuai dengan mengaitkan antara teori Hubungan Internasional dengan studi kasus yang sedang diteliti.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, yang memuat metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, subjek dan objek penelitian, dan hipotesis penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN, yang merupakan bagian penting dalam penelitian ini. Dalam bab ini akan menjelaskan secara detail hasil analisis dan riset yang dilakukan oleh peneliti mengenai studi kasus yang sedang diteliti.

BAB V PENUTUP, merupakan bagian akhir pada sebuah penelitian yang berisi rangkuman materi atau kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian ini yang disertai saran yang berguna untuk penelitian selanjutnya.